

ILUSI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Ayu Dyan Febrianti

STIE YKPN

Rudy Badrudin

STIE YKPN

e-mail: rudybadrudin.stieykpn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify the occurrence of the phenomenon of fiscal illusion in the influence of Regional Taxes, General Allocation Funds, Special Allocation Funds on Regional Expenditure and their influence on Economic Growth and Social Welfare in East Java Province in 2015-2018. The type of data used is secondary data. The object of research includes 38 regencies/cities in East Java Province with data sources obtained from Reports on Budget Realization and Economic Growth and Social Welfare. The analytical method used is Partial Least Square analysis. The conclusion obtained from the test is that Regional Taxes have a positive and significant effect on Regional Expenditures, General Allocation Funds have a positive and significant effect on Regional Expenditures, Special Allocation Funds have a positive but not significant effect on Regional Expenditures, Regional Expenditures have a positive and significant effect on Economic Growth, Growth The economy has a positive but not significant effect on people's welfare. There is a phenomenon of fiscal illusion where fiscal illusions have a positive and significant effect on economic growth but not a significant positive effect on social welfare in the regency/city of East Java Province in 2015-2018.

Keywords: *fiscal illusions, economic growth, welfare.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya fenomena ilusi fiskal pada pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah dan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2018. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Objek penelitian meliputi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan sumber data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2018. Metode analisis yang digunakan menggunakan analisis *Partial Least Square*. Kesimpulan yang diperoleh pada pengujian bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah, Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Terjadi fenomena ilusi fiskal pada pengaruh Pajak Daerah, DAU, DAK terhadap Belanja Daerah, dan Pengeluaran daerah yang terjadi ilusi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2018.

Kata kunci: ilusi fiskal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan.
JEL: H72

1. PENDAHULUAN

Wilayah di Indonesia terdiri dari berbagai provinsi, kabupaten/kota, di mana setiap daerahnya memiliki potensi yang berbeda-beda. Untuk dapat mengoptimalkan potensi di setiap daerah, pemerintah memberi ruang terhadap daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut mulai efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001 (Dude *et al.*, 2014). Dengan adanya desentralisasi ini, diharapkan agar pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat dari setiap daerah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu acuan dalam pengukuran kinerja suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat diidentifikasi melalui indikator IPM yang menandakan keberhasilan pada kenaikan kualitas sumber daya manusianya. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah yaitu belanja daerah (Krismajaya & Dewi, 2019). Penyusunan pendapatan dan pengeluaran suatu daerah dapat diamati dari perencanaan APBD. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai jika belanja daerah dialokasikan seimbang sesuai dengan porsinya atau tepat (Arini, 2016).

Sumber pendanaan penerimaan di daerah mencakup PAD, Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan dari sisi pengeluaran adalah Belanja Daerah. Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan jika dana perimbangan berisi, DAU, DAK, dan DBH (Marinus & Badrudin, 2016). Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebagai salah satu cara dalam menurunkan ketimpangan fiskal (vertikal) antara pusat dengan daerah maupun ketimpangan (horizontal) antardaerah (Rusydi, 2015). Besarnya dana perimbangan yang diberikan sebaiknya harus menjadi insentif dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Namun, dengan adanya dana transfer ini pemerintah daerah justru menggantungkan pendapatannya dari dana perimbangan dibandingkan dengan peningkatan pendapatan pajak daerah.

Berkaitan dengan tersebut, Dollery dan Worthington (1999) dalam (Adi & Ekaristi, 2009) menyatakan bahwa logikanya penerimaan daerah yang didapatkan harus berdampak pada pengeluaran daerahnya. Hubungan ini dapat dikatakan simetris dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Apabila hubungan bersifat asimetris, maka dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Karena pada dasarnya indikasi terjadinya ilusi fiskal itu jika masyarakat dan pemerintah pusat tidak menyadari bahwa sebenarnya dalam pemberian pajak, retribusi daerah, serta dana transfer, telah memberikan kontribusi yang lebih besar dari kebutuhan daerah. (Adi & Ekaristi, 2009).

Dalam penelitian ini, pemilihan objek penelitian didasarkan pada data laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018 dengan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang baik, yaitu menempati posisi ketiga di Pulau Jawa. Namun, pada data IPM di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur selalu menempati posisi terendah setiap tahunnya dengan menunjukkan upaya kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya berhasil. Hal ini

menjadi ketertarikan penulis dalam meneliti apakah terjadi ilusi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan ialah hubungan yang timbul antara *principal* bersama *agent* ketika terjadi kerja sama suatu kontrak. *Principal* melibatkan *agent* dalam melakukan beberapa layanan atas nama *principal*. Berdasar kontrak, *principal* mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusannya kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976).

Adanya kontrak *principal* dengan *agent* akan menyebabkan munculnya masalah keagenan. Menurut Smith & Bertozzi (1998) teori agensi memiliki fokus pada asimetris informasi. Asimetris informasi muncul ketika *agent* mengetahui informasi dan terlibat dalam penyediaan layanan namun, *principal* tidak mengetahui informasi tersebut karena *principal* tidak terlibat dalam penyediaan layanan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hubungan keagenan terjadi pada pemerintah pusat selaku *principal* dengan pemerintah daerah selaku *agent*.

2.2 Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith (1776), diperoleh dua aspek pokok pertumbuhan ekonomi. Aspek pertama adalah pertumbuhan *output* total serta aspek kedua adalah pertumbuhan penduduk. Unsur pokok pertumbuhan *output* total meliputi jumlah penduduk, SDA yang tersedia, serta stok barang modal yang ada (Arsyad, 2010:71-78). Solow-Swan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh tenaga kerja, jumlah penduduk, akumulasi modal, serta tingkat kemajuan teknologi yang bertambah (Sukirno, 2006:266). Teori ini biasa disebut juga dengan teori pertumbuhan Neo-Klasik yang dilandaskan pada fungsi produksi dan didukung Charles Cobb dan Paul Douglas.

Harrod-Domar, selalu berusaha membuktikan ketentuan apa saja yang diperlukan supaya perekonomian berkembang dan tumbuh dalam jangka panjang dengan baik. Teori ini menggunakan model jika tingkat pertumbuhan *output* akan sejalan dengan rasio tabungan-pendapatan. Nicholas Kaldor, kelompok masyarakat dibagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah kelompok kapitalis (Budiono, 1992:82-85). Kelompok kedua adalah kelompok buruh (Djojohadikusumo, 1994:49-52). Nicholas Kaldor juga membagi kelompok yang ada di dalam masyarakat berdasar ciri ekonomisnya, yaitu kelompok penduduk pedesaan dan perkotaan, serta kelompok sektor industri dan pertanian.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD ialah rancangan kerja dari pemerintah daerah meliputi semua pendapatan dan belanja yang ditunjukkan dengan satuan uang. Proses penyusunan APBD harus mendapat persetujuan dari DPRD, selanjutnya ditetapkan dalam peraturan daerah. Pajak daerah meliputi pajak yang dipungut kabupaten/kota, dan provinsi. Pajak daerah yaitu kontribusi wajib dari badan usaha maupun orang pribadi yang diserahkan kepada daerah. Sifat dari pajak daerah adalah memaksa berdasar UU yang berlaku, dan tanpa memperoleh imbalan secara langsung.

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah dana APBN yang didistribusikan kepada daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DAU ini ialah mengurangi ketimpangan horizontal keuangan antarpemerintah daerah (Siregar, 2017:87).

Pengalokasian DAU untuk setiap daerah ditentukan berdasarkan selisih dari kebutuhan daerah dan kemampuan dari daerah tersebut. Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan antara dana perimbangan lainnya. Karakteristik tersebut adalah *specific purpose grant*, artinya dana dari APBN yang dibagikan kepada daerah memiliki tujuan khusus guna membiayai kegiatan daerah sesuai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah (Siregar, 2017:92-93). DAK terdiri atas dua jenis, yakni DAK non fisik dan DAK fisik.

Belanja daerah ialah seluruh pengeluaran rekening kas umum daerah, yang kemudian mengurangi kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan oleh daerah tidak akan diterima kembali pembayarannya. Belanja daerah dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Todaro & Smith (2006:22), kesejahteraan masyarakat ialah patokan dari hasil standar pembangunan masyarakat guna memperoleh kehidupan yang memadai. Berkaitan dengan konteks ini, hal pertama adalah naiknya kemampuan pemerataan distribusi kebutuhan dasar diantaranya makanan, rumah, kesehatan, serta perlindungan. Kedua adalah naiknya tingkat kehidupan pada pendidikan, pendapatan, serta atensi budaya dan nilai kemanusiaan. Terakhir adalah perluasan skala ekonomi serta tersedianya pilihan sosial individu dan bangsa. Ketika tahun 1990, *United Nations Development Program* (UNDP) menyusun dan mengenalkan parameter yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu dengan formula HDI atau IPM.

2.5 Teori Ilusi Fiskal

Terkait kebijakan otonomi daerah, pemerintah pusat membagikan dana transfer untuk pemerintah daerah. Pemberian dana transfer diharapkan mampu menekan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat, yang membuat daerah akan jauh lebih mandiri. Namun, menurut Setiaji & Adi (2007) pada kenyataannya justru tingkat kemandirian pemerintah daerah mengalami penurunan. Pemerintah daerah cenderung meningkatkan penerimaan daerah tetapi tidak disertai dengan peningkatan pengeluaran daerah. Artinya, dalam hal ini ada hubungan yang asimetris antara sisi penerimaan dan pengeluaran daerah. Menurut Dollery & Worthington (1996:2), besarnya penerimaan yang tidak sejalan dengan pengeluaran ini dapat dikatakan terjadi ilusi fiskal (*fiscal illusion*). Ilusi fiskal dapat terjadi karena masyarakat dan pemerintah pusat tidak menyadari bahwa sebenarnya dalam pemberian pajak, retribusi daerah, serta dana transfer, telah memberikan kontribusi yang lebih besar dari kebutuhan daerah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Beberapa analisis sebelumnya tentang pengaruh pajak terhadap belanja daerah oleh Dude *et al.* (2014), Pratami & Dwirandra (2017), dan Laksono (2014), dengan hasil penelitian yang menegaskan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasar paparan tersebut, maka dinyatakan hipotesis di bawah ini:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Beberapa analisis sebelumnya tentang pengaruh DAU terhadap belanja daerah oleh Aprianti (2020), Dude *et al.* (2014), Bhakti (2013), Pratami & Dwirandra (2017), Nurhayati (2017), Laksono (2014), Masdjojo & Sukartono (2009), Amalia *et al.* (2015), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Berdasar paparan tersebut, maka dinyatakan hipotesis di bawah ini:

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Beberapa analisis sebelumnya tentang pengaruh DAK terhadap belanja daerah oleh Laksono (2014) dan Amalia *et al.* (2015), dengan menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan DAK terhadap belanja daerah. Berdasar paparan tersebut, maka dinyatakan hipotesis di bawah ini:

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa analisis sebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Cahyono (2016) dan Krismajaya & Dewi (2019), tentang pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang memperoleh hasil jika belanja daerah secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasar paparan tersebut, maka dinyatakan hipotesis di bawah ini:

H₄: Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa analisis sebelumnya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat yang dikerjakan oleh Deswantoro *et al.* (2017) dan Sasana (2009), yang memperoleh hasil pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian Adelfina & Jember (2016), menyatakan jika pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Berdasar paparan tersebut, maka dinyatakan hipotesis di bawah ini:

H₅: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data panel yaitu *cross section* pada 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur dan *time series* pada tahun 2015-2018. Dengan jenis penelitian kuantitatif dan teknik *purposive sampling* di mana sampel diambil secara sengaja dan tidak acak yang sesuai dengan tujuan masalah penelitian. Sampel yang dipakai pada penelitian adalah karakteristik semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018. Jumlah data yang akan di observasi adalah 152 data (29 kabupaten dan 9 kota dengan kurun waktu 4 tahun).

3.1 Data Penelitian

Jenis penelitian ini memakai data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapat peneliti dari terbitan atau laporan suatu lembaga (Algifari, 2015:9). Data sekunder PE dan IPM diperoleh peneliti melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder PD, DAU, DAK, dan BD diperoleh melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Metode pengumpulan data pada penelitian ialah teknik dokumentasi, yaitu di mana penulis mengumpulkan dokumen PD, DAU, DAK, BD, PE dan IPM, kemudian dokumen yang diperoleh akan disatukan dan dianalisis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

3.2 Variabel Independen

Merujuk pada UU No. 28 Tahun 2009, definisi pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang dari orang pribadi maupun badan. Pajak daerah bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung berdasar perundang-undangan, serta dipakai untuk keperluan pemerintah daerah untuk kemakmuran rakyat. Pengukuran variabel pajak daerah disajikan dalam bentuk satuan rupiah. Berdasar UU No 33 Tahun 2004, DAU ialah dana dari APBN yang diperuntukkan kepada daerah guna pelaksanaan desentralisasi dalam mendanai kebutuhan daerah. Pengukuran variabel DAU disajikan dalam bentuk satuan rupiah. Pengalokasian DAU dapat diukur dengan rumus:

Dana Alokasi Umum = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

DAK merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai fasilitas layanan publik yang belum sesuai standar. DAK memiliki ciri khusus di antara dana perimbangan lainnya, karena besaran DAK yang diperoleh daerah tidak dapat dipastikan setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan khusus untuk masing-masing daerah. Pengukuran variabel dana alokasi khusus disajikan dalam bentuk satuan rupiah.

3.3 Variabel Intervening

Berdasar UU 33 Tahun 2004, belanja daerah ialah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran variabel belanja daerah disajikan dalam bentuk satuan rupiah. Besarnya belanja daerah dapat diukur dengan rumus:

Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat diamati dari PDRB atas harga konstan. Pengukuran variabel pertumbuhan ekonomi disajikan dalam bentuk persentase. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan rumus:

$$PE = (PDRB_t - PDRB_{t-1}) / (PDRB_{t-1}) \times 100\%$$

3.4 Variabel Dependen

Tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator IPM. Pengukuran variabel kesejahteraan masyarakat disajikan dalam bentuk angka. IPM dapat diukur dengan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel PD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp208.705.140.077,76 dan nilai standar deviasi sebesar Rp537.041.142.111,29. Nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Sampang tahun 2015 sebesar Rp15.139.402.821, nilai maksimum dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2018 sebesar Rp3.817.402.592.324. Variabel DAU memiliki nilai rata-rata sebesar Rp940.978.882.648,06 serta nilai standar deviasi sebesar Rp299.968.681.244,66. Nilai minimum variabel DAU sebesar Rp378.916.109.000 dimiliki oleh Kota Mojokerto tahun 2018, nilai maksimum variabel DAU dimiliki Kabupaten Jember tahun 2016 sebesar Rp1.709.890.000.000.

Variabel DAK memiliki nilai rata-rata sebesar Rp234.349.597.067,55 serta nilai standar deviasi sebesar Rp131.285.770.027,61. Nilai minimum variabel DAK sebesar Rp7.125.690.000 dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2015, nilai maksimum variabel DAK

dimiliki Kabupaten Malang tahun 2018 sebesar Rp553.022.487.244. Variabel BD memiliki nilai rata-rata sebesar Rp2.171.569.263.675,46 dan nilai standar deviasi sebesar Rp1.158.145.076.527,09. Nilai minimum variabel BD sebesar Rp706.783.751.689 dimiliki oleh Kota Mojokerto tahun 2015, nilai maksimum variabel BD dimiliki Kota Surabaya tahun 2018 sebesar Rp8.176.929.496.299.

Variabel PE memiliki nilai rata-rata sebesar 5,44% serta nilai standar deviasi sebesar 2,01%. Nilai minimum variabel PE sebesar -2,66% dimiliki Kabupaten Bangkalan tahun 2015, nilai maksimum variabel PE dimiliki Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 sebesar 21,95%. Variabel KM yang ditunjukkan dengan indikator IPM memiliki nilai rata-rata sebesar 70,07% dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 5,32%. Nilai minimum variabel KM sebesar 58,18% dimiliki Kabupaten Sampang tahun 2015, nilai maksimum variabel KM dimiliki Kota Surabaya tahun 2018 sebesar 81,74%.

Tabel 1. Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
PD	152	15.139.402.821	3.817.402.592.324	208.705.140.077,76	537.041.142.111,29
DAU	152	378.916.109.000	1.709.890.000.000	940.978.882.648,06	299.968.681.244,66
DAK	152	7.125.690.000	553.022.487.244	234.349.597.067,55	131.285.770.027,61
BD	152	706.783.751.689	8.176.929.496.299	2.171.569.263.675,46	1.158.145.076.527,09
PE	152	-2,66	21,95	5,44	2,01
KM	152	58,18	81,74	70,07	5,32

Sumber: Data diolah, 2021

4.2 Analisis Induktif

Berdasarkan evaluasi model pada Tabel 2 nampak PD berpengaruh secara signifikan terhadap BD, dengan bukti bahwa p value sebesar $0,000 < 0,05$ dan t -statistic sebesar $8,930 > 1,96$. Nilai *original sample* sebesar 0,713 memperlihatkan bahwa hubungan variabel PD terhadap variabel BD adalah positif. DAU berpengaruh secara signifikan terhadap BD, dengan bukti p value sebesar $0,000 < 0,05$ dan t -statistic sebesar $6,581 > 1,96$. Nilai *original sample* sebesar 0,506 memperlihatkan bahwa hubungan variabel DAU terhadap variabel BD adalah positif.

DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap BD, dengan bukti bahwa p value sebesar $0,085 > 0,05$ dan t -statistic sebesar $1,376 < 1,96$. Nilai *original sample* sebesar 0,036 yang memperlihatkan bahwa hubungan variabel DAK terhadap variabel BD adalah positif. Namun, DAK dapat berpengaruh secara signifikan terhadap BD apabila tingkat signifikansi dinaikkan pada angka 10%. BD berpengaruh secara signifikan terhadap PE, dengan bukti bahwa p value sebesar $0,001 < 0,05$ dan t -statistic sebesar $2,998 > 1,96$. Nilai *original sample* sebesar 0,123 memperlihatkan bahwa hubungan variabel BD terhadap variabel PE adalah positif.

PE berpengaruh tidak signifikan terhadap KM, dengan bukti bahwa p value sebesar $0,056 > 0,05$ dan t -statistic sebesar $1,596 < 1,96$. Nilai *original sample* sebesar 0,214 memperlihatkan bahwa hubungan variabel PE terhadap variabel KM adalah positif. Namun, PE dapat berpengaruh secara signifikan terhadap KM apabila tingkat signifikansi dinaikkan pada angka 10%.

Tabel 2. Path Coefficients

Hipotesis	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	T-Statistic	P Value	Prediksi	Hasil	Keputusan
PD → BD	0,713	0,693	0,08	8,93	0,000	+	+	Diterima*
DAU → BD	0,506	0,516	0,077	6,581	0,000	+	+	Diterima*
DAK → BD	0,036	0,039	0,026	1,376	0,085	+	+	Ditolak
BD → PE	0,123	0,121	0,041	2,998	0,001	+	+	Diterima*
PE → KM	0,214	0,258	0,134	1,596	0,056	+	+	Ditolak

Keterangan: * = $T\text{-Statistic} > 1,96$ dan $P\text{ Value} < 0,05$

Tabel 3. Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>	Keterangan
Belanja Daerah	0,961	Variabel pajak daerah, DAU, dan DAK mampu menjelaskan variabel belanja daerah sebesar 96,1%, sedangkan sisanya sebesar 3,9% dijelaskan oleh faktor lain. Nilai ini menunjukkan pengaruh dalam kategori tinggi.
Pertumbuhan Ekonomi	0,015	Sebesar 1,5% variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel belanja daerah, sedangkan sisanya sebesar 98,5% dijelaskan oleh faktor lain. Nilai ini menunjukkan pengaruh dalam kategori tidak memiliki kemampuan.
Kesejahteraan Masyarakat	0,046	Variabel pertumbuhan ekonomi mampu menjelaskan variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 4,6%, sedangkan sebesar 95,4% dijelaskan oleh faktor lain. Nilai ini menunjukkan pengaruh dalam kategori tidak memiliki kemampuan.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasar hasil uji analisis yang dikerjakan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan diterimanya hipotesis 1 (H1). Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dengan nilai $p\text{ value}$ $0,000 < 0,05$ dan nilai $t\text{-statistic}$ $8,930 > 1,96$. Oleh sebab itu, meningkatnya pajak daerah akan memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan belanja daerah yang akan dicapai.

Hasil penelitian dengan pengaruh positif dan signifikan ini menandakan jika semakin bertambah pajak daerah yang dimiliki maka akan semakin bertambah juga belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan tingginya pajak daerah yang didapat, akan semakin memungkinkan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik masyarakat, mengingat bahwa pajak daerah merupakan penerimaan terbesar di dalam pendapatan asli daerah. Hal ini dapat menunjang usaha pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan dari dana transfer pemerintah pusat guna mendanai kebutuhan daerah itu sendiri.

Selanjutnya, implementasi pajak daerah yang berpengaruh terhadap belanja daerah dapat dilihat dari data pajak daerah dan belanja daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018. Kota

Surabaya memiliki jumlah tertinggi dalam penerimaan pajak daerah serta memiliki jumlah tertinggi dalam pengalokasian belanja daerah setiap tahunnya selama kurun waktu 4 tahun. Tingginya penerimaan pajak daerah ini didukung dengan upaya sosialisasi melalui media massa, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib membayar pajak oleh Yusron Sumartono selaku Kepala DPPK (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan) Kota Surabaya. Selain itu, didorong oleh sistem pemungutan pajak yang efisien dengan adanya kerja sama antara pemerintah kota dan bank, sehingga pembayaran pajak dapat dipermudah (Suara Surabaya, 2016).

Hasil dalam penelitian didukung oleh penelitian Dude *et al.* (2014), Pratami & Dwirandra (2017), serta Laksono (2014). Pada penelitian tersebut memperoleh hasil yang menyatakan jika pajak daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasar hasil uji analisis yang dilakukan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan diterimanya hipotesis 2 (H2). Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dengan nilai *p value* $0,000 < 0,05$ dan nilai *t-statistic* $6,581 > 1,96$. Oleh sebab itu, meningkatnya DAU akan memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan belanja daerah. Penjelasan pengaruh positif dan signifikan ini menandakan jika semakin tingginya penerimaan DAU maka akan semakin tinggi belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Namun, jika penerimaan DAU tinggi maka akan mengurangi tingkat kemandirian dari pemerintah daerah.

DAU bersifat *Block Grant*, yaitu di mana peranan penggunaan dananya berada di tangan pemerintah daerah yang didasarkan pada prioritas kebutuhan fiskal daerah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik masyarakat. Adanya DAU ini, diharapkan pemerintah daerah mampu mengatasi ketimpangan horizontal antardaerah. Dalam penelitian, implementasi DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dapat dilihat dari data DAU terkecil diterima oleh Kota Mojokerto tahun 2018, serta di tahun yang sama pengalokasian belanja daerah terendah berada di Kota Mojokerto.

Hasil uji pada penelitian ini didukung oleh penelitian Aprianti (2020), Dude *et al.* (2014), Bhakti (2013), Pratami & Dwirandra (2017), Nurhayati (2017), Laksono (2014), Masdjojo & Sukartono (2009) serta Amalia *et al.* (2015). Pada penelitian tersebut memperoleh hasil yang menyatakan bahwa DAU akan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengalokasian belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Berdasar hasil uji analisis yang dilakukan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 (H3) tersebut ditolak. Peneliti memprediksi bahwa DAK dalam kurun waktu 4 tahun akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Namun, hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dengan nilai *p value* $0,085 > 0,05$ dan nilai *t-statistic* $1,376 < 1,96$. Tetapi hasil dapat menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah apabila batas tingkat signifikansi sebesar 0,1.

Hasil uji pada penelitian didukung oleh penelitian Aprianti (2020), Masdjojo & Sukartono (2009). Sedangkan, hasil penelitian lain Pratami & Dwirandra (2017), menunjukkan DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja daerah. Namun, penelitian tersebut tidak mendukung penelitian Laksono (2014) yang menjelaskan

bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Penjelasan terhadap pengaruh positif namun tidak signifikan tersebut dapat disebabkan oleh besaran DAK yang relatif kecil nilainya di antara dana perimbangan lain, sehingga membuat faktor lain seperti pajak daerah, DAU, dan DBH lebih banyak dalam mempengaruhi belanja daerah. Hal ini menjadi salah satu faktor belanja daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh DAK. Pengalokasian DAK yang relatif kecil ini dipakai untuk mendanai kegiatan khusus dari program yang menjadi kebutuhan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Hal ini dapat diartikan jika DAK tidak dapat disalahgunakan untuk kegiatan di luar ketentuan. Dengan demikian, besaran DAK yang relatif kecil ini tidak mempengaruhi besarnya belanja daerah yang dikeluarkan.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasar hasil uji analisis yang dilakukan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan diterimanya hipotesis 4 (H4). Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dengan nilai p value $0,001 < 0,05$ dan nilai t -statistic $2,998 > 1,96$. Oleh sebab itu, semakin banyaknya alokasi belanja daerah maka akan memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penjelasan pengaruh positif dan signifikan ini menandakan jika belanja daerah yang dialokasikan oleh pemerintah daerah secara langsung digunakan untuk pembangunan layanan publik. Pembangunan sarana dan prasarana publik yang dilakukan dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di seluruh Jawa Timur berada di atas rata-rata ekonomi nasional, hal ini dikatakan oleh Sugihardjo (Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan). Selanjutnya, kuatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan membuat perekonomian terus meningkat. Berbagai pembangunan masif yang dijalankan salah satunya adalah di bidang perkeretaapian, yaitu dengan membangun *double track* yang diharapkan menambah kapasitas angkutan dan menyingkat waktu tempuh diantaranya, lintas Madiun-Surabaya, lintas Bangil-Malang-Blitar-Kertosono serta lintas Surabaya-Jember-Banyuwangi (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2017).

Selain itu, dilihat dari data jumlah belanja daerah selama kurun waktu 4 tahun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Artinya, pengalokasian belanja daerah dilakukan secara efisien untuk proyek pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapat pengaruh yang searah dan signifikan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hasil uji pada penelitian ini didukung oleh penelitian Putri & Cahyono, (2016), dan Krismajaya & Dewi (2019), tetapi penelitian ini tidak mendukung hasil Taher & Tuasela (2019) yang menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasar hasil uji analisis yang dilakukan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 5 (H5) tersebut ditolak. Peneliti memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 4 tahun dapat mempengaruhi positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dengan nilai p value $0,056 > 0,05$ dan nilai t -statistic $1,596 < 1,96$. Tetapi hasil dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat apabila batas tingkat signifikansi sebesar 0,1.

Hasil penelitian ini didukung penelitian dari Siregar & Badrudin (2019) yang

menyampaikan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial, karena dalam melakukan pembangunan ekonomi, pemerintah hanya fokus terhadap persentase pertumbuhan ekonomi saja. Namun, berbeda dengan penelitian Deswanto *et al.*, (2017) dan (Sasana, 2009) yang menyampaikan jika pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, serta penelitian Adelfina & Jember (2016), yang menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Hasil penelitian dengan pengaruh positif namun tidak signifikan ini menandakan jika pertumbuhan ekonomi yang dilakukan belum dapat memajukan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut terjadi karena dalam mengejar ketertinggalan ekonomi, pemerintah melakukan pembangunan secara eksklusif, yaitu di mana pembangunan hanya dilakukan untuk mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan ekonomi dan hanya dilakukan oleh sektor yang memiliki modal. Pembangunan eksklusif ini biasanya kurang memperhatikan penyerapan tenaga kerja yang membuat masyarakat cenderung tidak bekerja. Banyaknya masyarakat yang tidak bekerja kemungkinan akan meningkatkan pengangguran dan berakibat pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar.

Menurut Suryanto *et al.* (2005:10) dan Soesilowati *et al.* (2005), kesejahteraan masyarakat akan tercipta jika kebutuhan dasar pangan, sandang, rumah, pendidikan, serta kesehatan telah terpenuhi. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ini akan menghambat kesejahteraan masyarakat. Terlihat pada kebutuhan dasar terkait pendidikan, yaitu dari tingginya masyarakat dengan pendidikan rendah (rata-rata SMP ke bawah). Dengan didominasinya masyarakat dengan pendidikan rendah ini, rasio pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 meningkat dari tahun sebelumnya (*Suara Surabaya*, 2015). Masyarakat yang memiliki pekerjaan menandakan bahwa mereka dalam tingkat ekonomi yang baik, sehingga kebutuhan dasarnya akan terpenuhi, dengan banyaknya masyarakat yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi maka akan meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat.

Analisis Terjadinya Ilusi Fiskal

Berdasar hasil uji dan pembahasan, maka dapat dianalisis ada atau tidaknya fenomena ilusi fiskal dari pengaruh pajak daerah, DAU, dan DAK terhadap belanja daerah. Syarat ilusi fiskal terjadi jika penerimaan daerah tidak memberi dampak terhadap pengeluaran daerah, atau dapat dilihat dari hasil analisis nilai signifikansi variabel pajak daerah, DAU, dan DAK lebih dari 5% atau $p \text{ value} > 0,05$.

Hasil uji pada Tabel 2 menunjukkan jika variabel pajak daerah dan DAU memiliki nilai $p \text{ value}$ sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sedangkan untuk variabel DAK memiliki nilai $p \text{ value}$ sebesar 0,085 sehingga nilai tersebut melebihi tingkat signifikansi 0,05. Berdasar hasil penelitian, diketahui bahwa terjadi ilusi fiskal di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa timur selama tahun 2015-2018 pada variabel DAK, karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

DAK ialah dana yang berasal dari APBN untuk tujuan mendanai kebutuhan khusus yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta prioritas nasional. Pengalokasian DAK untuk belanja daerah seharusnya mampu diarahkan terhadap perbaikan pembangunan baik fisik dan non fisik, sehingga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasar hasil analisis tersebut, terjadinya ilusi fiskal pada variabel DAK disebabkan karena belum sepenuhnya

penerimaan DAK dimanfaatkan dengan baik, serta kemungkinan terjadi ketidaksesuaian pemerintah daerah dalam mengalokasikan penerimaan DAK, sehingga hal tersebut mungkin dapat mengindikasikan bahwa adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hasil uji pada penelitian didukung oleh penelitian (Dyahningtyas *et al.*, 2019), (Aprianti, 2020), (Dude *et al.*, 2014), (Nurhayati, 2017). Pada penelitian tersebut menemukan bahwa terjadi fenomena ilusi fiskal pada daerah yang diteliti. Hal tersebut terjadi karena adanya penerimaan daerah yang tidak berdampak pada pengeluaran daerahnya.

5. KESIMPULAN

Berdasar pada hasil uji serta pembahasan yang dikerjakan peneliti, kesimpulan yang diperoleh adalah PD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD karena *p value* sebesar $0,000 < 0,05$, *t-statistic* sebesar $8,930 > 1,96$, dan nilai *original sample* sebesar 0,713 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel bertanda positif. Oleh karena itu, meningkatnya pendapatan pajak daerah akan memberi dampak terhadap alokasi belanja daerah, hal ini diakibatkan oleh pajak daerah termasuk penerimaan terbesar dalam PAD, sehingga dalam memenuhi kebutuhan pengalokasian belanja daerah akan mempertimbangkan perolehan pajak daerah dari setiap masing-masing daerah.

DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD karena *p value* sebesar $0,000 < 0,05$, *t-statistic* sebesar $6,581 > 1,96$, dan nilai *original sample* sebesar 0,506 yang memperlihatkan hubungan variabel bertanda positif. Oleh karena itu, meningkatnya penerimaan DAU akan memberi dampak terhadap alokasi belanja daerah, hal ini dapat disebabkan oleh DAU yang bersifat *Block Grant* (di mana peranan penggunaan dana berada di tangan pemerintah daerah), sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana sesuai pada prioritas kebutuhan fiskal daerah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik masyarakat.

DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap BD karena *p value* sebesar $0,085 > 0,05$, *t-statistic* sebesar $1,376 < 1,96$, dan nilai *original sample* sebesar 0,036 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel bertanda positif. Oleh karena itu, meningkatnya penerimaan DAK belum mampu memberi dampak terhadap alokasi belanja daerah, hal ini dapat disebabkan oleh besaran nilai DAK yang relatif kecil di antara dana perimbangan lainnya, sehingga membuat faktor lain seperti pajak daerah, DAU, dan DBH lebih banyak dalam mempengaruhi belanja daerah. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD jika tingkat signifikansi berada pada angka 10%, karena *p value* sebesar $0,085 < 0,1$.

BD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE karena *p value* sebesar $0,001 < 0,05$, *t-statistic* sebesar $2,998 > 1,96$, dan nilai *original sample* sebesar 0,123 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel bertanda positif. Oleh karena itu, meningkatnya pengalokasian belanja daerah akan memberi dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh alokasi belanja daerah yang dilakukan telah secara langsung digunakan untuk pembangunan layanan publik, di mana sarana dan prasarana tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

PE berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap KM karena *p value* sebesar $0,056 > 0,05$, *t-statistic* sebesar $1,596 < 1,96$, dan nilai *original sample* sebesar 0,214 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel bertanda positif. Oleh karena itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada meningkatnya kemakmuran masyarakat, hal ini

disebabkan oleh pemerintah daerah melakukan pembangunan yang bersifat eksklusif, yaitu di mana pembangunan hanya mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan ekonomi, serta kurang memperhatikan pengurangan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja sehingga membuat masyarakat cenderung menganggur. PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap KM jika tingkat signifikansi berada pada angka 10%, karena p value sebesar $0,056 < 0,1$.

Terjadinya ilusi fiskal jika penerimaan daerah tidak memberi dampak terhadap pengeluaran daerah, atau dengan hasil signifikansi lebih dari 5%. Pengujian menemukan bahwa PD dan DAU memberi dampak terhadap BD, dengan memiliki p value sebesar $0,000 < 0,05$, sedangkan untuk DAK memiliki p value sebesar $0,085 > 0,05$, yang berarti DAK tidak memberi dampak terhadap BD. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan terjadinya ilusi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018 yang disebabkan oleh belum sepenuhnya penerimaan DAK dimanfaatkan dengan baik, serta kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dalam mengalokasikan penerimaan DAK oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian yang menunjukkan terjadi ilusi fiskal pada BD, serta hasil pengaruh positif dan signifikan belanja daerah terhadap PE, dan hasil pengaruh positif namun tidak signifikan PE terhadap KM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelfina, & Jember, I. M. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 - 2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(10), 1011–1025.
- Adi, P. H., & Ekaristi, P. D. (2009). Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.21002/jaki.2009.01>
- Algifari. (2010). *Statistika Deskriptif Plus untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (2009 – 2013). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i1.171>
- Aprianti, Y. (2020). Deteksi ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah daerah di sulawesi tengah *Detection of fiscal illusions in local government budget performance in central*. 22(1), 114–122.
- Arini, P. R. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 2(2), 180–198.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bhakti, A. (2013). Deteksi Ilusi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Penguji Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah dalam Merespon Dana Perimbangan). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 71–80.
- Budiono. (1992). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4: Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.

- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Djojohadikusumo, S. (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Dollery, B. E., & Worthington, A. C. (1996). The empirical analysis of fiscal illusion. *Journal of Economic Surveys*, 10(3), 261–297. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.1996.tb00014.x>
- Dude, D. P., Kumenaung, A., & Rotinsulu, D. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Dan Fiscal Illusion Pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 29–43.
- Dyahningtyas, R., Suharsih, S., & Astuti, S. R. B. (2019). Kinerja Keuangan Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1), 119–130. <https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5443>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3, 305–360.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, (2017). <http://dephub.go.id/post/read/kemenhub-terus-dorong-potensi-infrastruktur-transportasi-di-wilayah-jawa-timur?language=id>
- Krismajaya, I. P., & Dewi, N. P. M. (2019). Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi terhadap Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(6), 1390–1422.
- Laksono, bagus bowo. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4207>
- Marinus, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98.
- Masdjojo, G. N., & Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Jurnal Telaah Manajemen*, 6(1), 32–50.
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Deteksi Fiscal illusion dengan Pendekatan Revenue Enhancement Pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(2), 109–119. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i2.1425>
- Pratami, A. A. P. N. I., & Dwirandra, A. A. N. B. (2017). Pengaruh Pad, Dana Perimbangan, Lpds, Dan Pdrb Pada Belanja Daerah Serta Deteksi Ilusi Fiskal. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(2), 1141–1170.
- Putri, S. A., & Cahyono, H. (2016). Pengaruh Belanja Daerah Dan Pmdn Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.26740/jupe.v4n3.p>
- Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan

- Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 16(1), 50–69.
- Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa - Bali). *Simposium Nasional Akuntansi X*, 1–29.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siregar, B., & Badrudin, R. (2019). The Evaluation of Fiscal Decentralization in Indonesia Based on the Degree of Regional Autonomy. *Journal of Reviews on Global Economics*, 8, 611–624. <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2019.08.53>
- Smith, R. W., & Bertozzi, M. (1998). Principals and agents: an explanatory model for public budgeting. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 10(3), 325–353.
- Soesilowati, E. S., Sarana, J., Suhodo, D. S., & Ermawati, T. (2005). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Kinerja Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan Kesehatan*.
- Suara Surabaya, (2015). <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2015/Awal-2015-Angka-Pengangguran-di-Jatim-892-Ribu-Orang/>
- Suara Surabaya, (2016). <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2016/PAD-Kota-Surabaya-dari-Pajak-Tembus-Rp-273-Triliun/>
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Suryanto, Joko, & Sarana, J. (2003). *PAD dan Daya Saing Ekonomi dalam Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Taher, S., & Tuasela, A. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 3(2), 40–58.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Economic Development*. New York: Pearson Addison Wesley